

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Local Strongman**

Joel Migdal (1988) memberikan deskripsi tentang “orang kuat lokal” sebagai pemimpin nonformal negara contohnya tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, za'im, effendi, agha, cacique dan kulaks, yang membentuk sebuah organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring pada rangka melaksanakan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tertentu. “orang kuat lokal” melaksanakan beragam kegiatan contohnya memberikan kredit, menyediakan akses rakyat kepada tanah, melindungi keamanan, pemerasan dan tindakan lainnya. Mereka juga menerapkan penghargaan, hukuman serta simbol sebagai bentuk kontrol sosial atas masyarakat. “Orang kuat lokal” beroperasi di negara pasca-kolonial dari Asia dan Afrika yang masih lemah melakukan kontrol sosial atas masyarakatnya terutama di ranah lokal. Kontrol sosial dilaksanakan terutama untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, melaksanakan penetrasi di dalam masyarakat, mengambil sumber daya yang ada pada masyarakat serta menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat. (Migdal (Hutabarat, 2012)).

Tetapi dalam kajian politik *local strongman* khususnya dalam pemilu bisa juga diartikan sebagai orang yang memiliki pengaruh di tengah

masyarakat, dan biasanya *local strongman* ialah seorang pengusaha, tokoh agama serta tokoh masyarakat sekalipun. Seperti halnya dalam kemenangan Rico Oktora yang diduga memang adanya peran *local strongman*, sehingga dia selama tiga periode berturut-turut memenangkan kontestasi legislatif di tingkat lokal.

Kemunculan *local strongman* sebagai salah satu sumber kekuasaan yang dimiliki adalah kekayaan. Dari sisi tersebut *local strongman* dipandang sebagai bos ekonomi dan memiliki kecenderungan menjadi investor politik yang pada akhirnya mempengaruhi desentralisasi yang sejati di tingkat lokal. (Nuraliyah Zainal (Fikri Fahriza R, 2021).

Fenomena *local strongman* menjadi bagian dari kontestasi politik di ranah lokal. Orang kuat lokal bisa dikatakan sebagai konsekuensi dari bentuk kebijakan desentralisasi. Agustino (dalam (Handoko, Darmansyah, & Syofian, 2020)) menyebutkan bahwa “lahirnya kebijakan desentralisasi menyebabkan terjadinya fenomena-fenomena orang kuat lokal....dampak dari fenomena politik lokal tersebut menghadirkan bos ekonomi dan orang kuat lokal yang kemudian menjadi tokoh formal”. Fenomena *local strongman* ini menguat karena para calon dalam melakukan kontestasi politik di percaya memerlukan materi hingga relasi untuk meraih kemenangan. Sehingga para calon memerlukan peran dari mereka yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Tidak sedikit calon yang memiliki *local strongman* dalam melaksanakan kontestasi politik.

Pada penelitian Halifah (dalam (Handoko, Darmansyah, Syofian, 2020)) *local strongman* dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu dari strategi kemenangan kandidat. Dengan mengikut sertakan local strongmen kedalam salah satu strategi kemenangan kandidat dapat memengaruhi perolehan suara untuk memilih kandidat yang diusung. Apabila seorang calon memiliki *local strongman* dalam pelaksanaan pemilu dirinya mendapat bantuan baik berupa materi yang diperlukan selama pelaksanaan pemilu mulai dari persiapan, kampanye, hingga pelaksanaan pemilu juga mendapat bantuan berupa relasi dan nama baik akibat dari bantuan yang diberikan oleh orang kuat lokal ini karena pengaruh dirinya yang besar di mata masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memercayai calon yang diusung oleh orang kuat lokal ini.

Selaras dengan hal di atas, kemunculan *local strongman* ini didasarkan faktor-faktor dalam lingkungan sosial. Contohnya, orang yang mempunyai capital serta pengaruh yang kuat seperti tokoh masyarakat atau pun tokoh adat. (Handoko, Darmansyah, Syofian, 2020). Orang kuat, bosisme, atau local strongmen memiliki kesamaan istilah. Mereka berada di setiap level baik kabupaten/kota maupun yang menguasai provinsi. (Suaib & Zuada, 2015). Pengaruh yang dimiliki oleh *local strongman* diperlukan oleh sang calon untuk mengambil hati masyarakat agar memberikan suaranya dalam pemilu.

Faktor munculnya orangkuat lokal oleh migdal dijelaskan sebagai berikut.

“Pertama, *local strongman* tumbuh subur pada masyarakat yang mirip dengan jejaring. Berkat struktur yang mirip jejaring inilah, para orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan yang jauh melampaui pengaruh para pemimpin serta para birokrat lokal formal. Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai ‘strategi bertahan hidup’. Logika bertahan hidup, memberikan kesempatan bagi *local strongman* bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya (baca: pengikutnya) yang (serba) kekurangan – di daerah kekuasaan mereka. Ketiga, *local strongman* secara langsung ataupun tidak telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah. (Leo Agustin (Nurholis, 2016)).

Menurut Migdal (dalam (Zakly Hanafi Ahmad, 2020)) keberhasilan *local strongman* atau orang kuat lokal dalam mencapai monopoli dan kontrol sosial mereka di masyarakat didasari atas tiga faktor.

- a. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, dimana klientelisme tumbuh subur dan berkembang. Sehingga kontrol sosial terfokus pada kekuatan-kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh negara.
- b. Kedua, karena mindset yang mendarah daging yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di antara mereka, yang mana orang kuat menjadi panutan di kehidupan masyarakat lokal, dan
- c. Ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadi alur lembaga pemerintahan disana

berpihak kepada kepentingan mereka.

Migdal mendefinisikan negara sebagai organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya diluar dirinya. 5

Secara lengkapnya Joel S. Migdal mengatakan:

“The state is a sprawling organization within society that coexists with many other formal and informal social organizations, from families to tribes to large industrial enterprises. What distinguishes the state, at least in the modern era, is that state officials seek predominance over those myriad other organizations. That is, they aim for the state to make the binding rules guiding people’s behavior or, at the very least, to authorize particular other organizations to make those rules in certain realms. By “rules” I mean the laws, regulations, decrees, and the like that state officials indicate they are willing to enforce through the coercive means at their disposal. Rules include everything from living up to contractual commitments to driving on the right side of the road to paying alimony on time. They involve the entire array of property rights and any of the other countless definitions of the boundaries delineating acceptable behavior for people”

“Negara adalah organisasi yang luas di dalam masyarakat yang berdampingan dengan banyak organisasi sosial formal dan informal lainnya, dari keluarga, suku, perusahaan industri besar. Yang membedakan negara, di era modern setidaknya, adalah bahwa pejabat negara mencari dominasi atas segudang organisasi lainnya. Artinya, tujuan mereka untuk negara adalah untuk membuat aturan yang mengikat yang membimbing perilaku masyarakat atau, setidaknya, untuk mengotorisasi/ menguasai organisasi lain khususnya untuk membuat aturan-aturan pada aspek tertentu. Dengan "aturan" saya mengartikannya hukum, peraturan, keputusan, dan seperti pejabat negara yang menunjukkan kesediaan mereka untuk menegakkan melalui pemaksaan yang mereka tetapkan. Aturan mencakup segala sesuatu dari hidup, komitmen kontrak, mengemudi di sisi kanan jalan, membayar tunjangan tepat waktu. Mereka melibatkan seluruh peranti hak milik dan salah satu definisi yang tak terhitung lainnya dari batas-batas yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.” (Joel S. Migdal, *State in Society*).

Menurut Migdal (dalam (Handoko, Darmansyah, & Syofian, 2020) mengatakan bahwa, orang kuat lokal selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya agar menguntungkan bisnis dan posisinya. Hubungan ini kemudian menjadi hubungan timbal balik. Ketika *local strongman* memberikan bantuannya kepada calon saat pelaksanaan pemilu maka ketika calon berhasil memenangkan kontestasi ini dan duduk di kursi pemerintahan merupakan waktu baginya untuk membalas bantuan ini baik dengan jabatan yang diberikan atau pelancaran proyek-proyek yang dibutuhkan.

Meskipun keberadaan *local strongman* lebih banyak ditentukan oleh tingkat pengaruhnya, tetapi keberadaan mereka pula sangat ditentukan oleh dukungan struktur negara. Migdal menyebutkan sebagai *triangle of accommodation*. Dominasi *local strongman* akan kurang maksimal bila negara tidak mendukung sepenuhnya. Sebab itu, keberadaan mereka juga sangat tergantung pada kelihaihan kelihaihan orang-orang kuat lokal ini untuk mendapatkan dukungan negara. Kolaborasi antara orang kuat lokal dan negara menjadi dasar kuatnya pengaruh *local strongman* dalam masyarakat lokal. Demi kepentingan negara, negara bersedia memberikan fasilitas sekaligus mengontrol para *local strongman*. (Migdal (Holifah, 2018)).

*Local strongman* melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang dijakini masyarakat sebagai strategi. Kemudian *local strongman* juga telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan

aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para *local strongman* dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Orang kuat lokal selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya agar kebijakan resmi menguntungkan bisnis dan posisinya.

Dalam pemilu legislatif biasanya peran *local strongman* tidak lepas dari memobilisasi masyarakat dengan mengikut sertakan indikator penting yang dinamakan “strategi bertahan hidup” kepada penduduk setempat. Dengan keadaan ini, *local strongman* atau orang kuat bukan hanya mempunyai legitimasi serta mengantongi banyak dukungan di antara masyarakat lokal, akan tetapi hadir sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Serta biasanya masyarakat harus melakukan timbal balik dengan cara memberikan hak suaranya kepada calon yang di dukung *local strongman*.

Sehingga hal yang disampaikan di atas menarik untuk diteliti dalam membangun kemenangan Rico Oktora pada pemilihan umum legislatif 2019 di kecamatan cipedes Kota Tasikmalaya.

## **2. Pemilihan Legislatif Lokal**

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, Pemilu yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan alat setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan kadaulatan dan merupakan sebuah lembaga demokrasi.

Asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu antara lain:

a. Langsung

Langsung maksudnya adalah rakyat (berperan sebagai pemilih) memiliki wewenang untuk menentukan pilihannya secara langsung tanpa perantara sesuai dengan keinginan sendiri.

b. Umum

Definisi dari umum itu sendiri diartikan sebagai seluruh warga negara dapat mengikuti pemilu tanpa dibatasi oleh identitasnya serta mencukupi syarat yang berlaku.

c. Bebas

Bebas diartikan pemilih yang telah memenuhi syarat mampu membuat keputusan tanpa tekanan hegemon dalam pemilu.

d. Rahasia

Rahasia yang dimaksud adalah, kerahasiaan pemilih dapat terjaga saat melakukan pemilu. Kertas suara yang telah terisi tidak memiliki identitas dari siapa yang telah mengisinya.

e. Jujur

Jujur dalam poin ini dimaksudkan dengan serial pemilih akan melakukan perannya dalam memilih secara jujur di pemilu.

f. Adil

Diartikan sebagai, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pembeda selama pelaksanaan pemilu, (Mulyana, 2016).

Menurut Ali Moetopo, negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga dalam melanjutkan pemerintahan, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diberi kesempatan dalam memilih orang-orang di pemerintahan melalui sebuah pesta demokrasi yang bernama pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun lokal dalam memilih kepala pemerintahan atau wakil rakyat. Pemilu ialah sarana yang ada bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya serta merupakan lembaga demokrasi. (Admin, 2016)

Akibat dari kebijakan desentralisasi, pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yaitu pemilihan legislatif juga hadir di tingkat lokal. Banyaknya calon legislatif membuat persaingan dalam merebut kursi wakil rakyat juga begitu ketat.

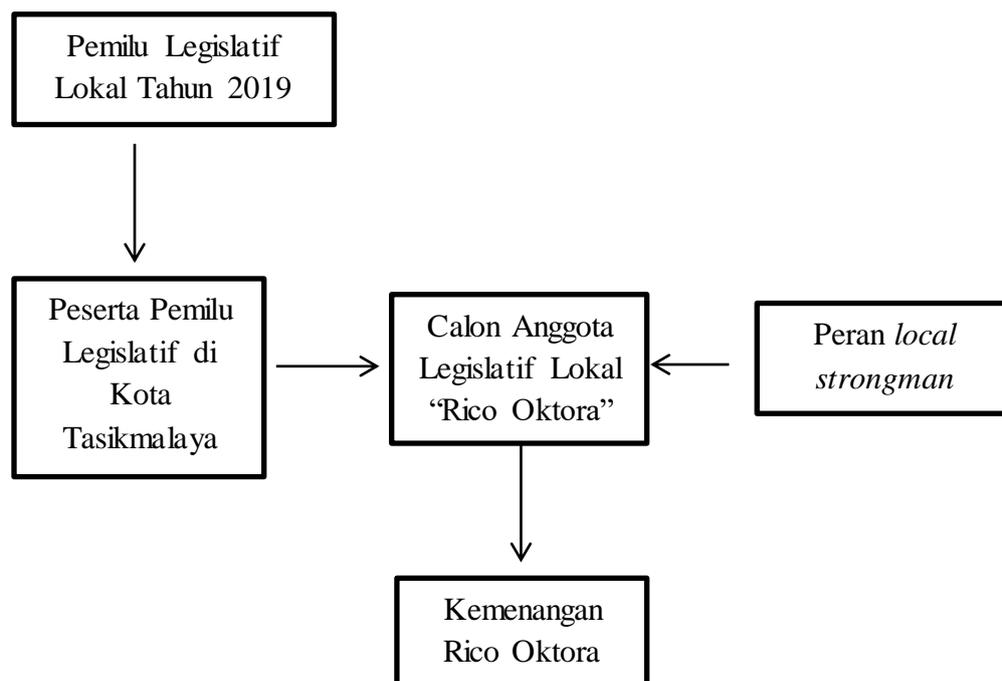
Penyelenggaraan pemilu di Indonesia baik itu pemilihan legislatif yang bersifat nasional adalah tanggung jawab KPU yang sebagaimana dalam UU No 15/2011. Tidak hanya KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang bertanggung jawab, adapun Bawaslu (Badan

Pengawas Pemilu) dimana lembaga ini bertugas untuk mengawasi pemilu, termasuk pemilihan legislatif. Selain kedua lembaga tersebut, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas sebagai pemeriksa gugatan maupun laporan dengan tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu, (Mulyana, 2016).

Selama sejarah di Indonesia pemilu legislatif sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali yakni tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sedangkan pemilu legislatif pertama di Kota Tasikmalaya yakni pada tahun 2004. Pada pemilihan legislatif yang telah diselenggarakan di Kota Tasikmalaya tersebut Rico terpilih terus menerus selama tiga periode.

## B. Kerangka Pemikiran

**Bagan 1 Kerangka Pemikiran**



Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum 2019 adalah pemilihan serentak pertama kali yang dilakukan di Indonesia, salah satunya yaitu pemilihan umum legislatif lokal di Kota Tasikmalaya. Pada Pemilihan umum legislatif di tingkat lokal khususnya di Kota Tasikmalaya terdapat peserta pemilihan legislatif lokal yang berjumlah sebanyak 495 peserta dengan memperebutkan 45 kursi legislatif.

Salah satu peserta pemilu yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah Rico Oktora. Rico Oktora menjadi calon legislatif dengan dapil Cipedes – Indihiang. Rico telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk yang ketiga kalinya. Walaupun salah satu dari ketiga kali Rico mencalonkan diri, beliau diusung oleh partai yang berbeda.

Kemenangan Rico Oktora dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 tidak luput dari hadirnya peran *local strongman*. *Local strongman* memiliki peran yang dapat membantu Rico dalam berkampanye. Peran ini berupa memperkenalkan Rico kepada masyarakat khususnya di daerah pemilihan. Kehadiran dan peran yang diberikan oleh *local strongman* pada masa kampanye Rico Oktora, membawa dampak positif bagi kemenangan Rico Oktora.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan bagi penelitian yang hendak dilaksanakan

oleh peneliti saat ini. Oleh sebab itu, penyusun melampiri beberapa penelitian yang dianggap telah relevan dengan judul sekarang, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Ringkasan	Persamaan	Perbedaan
1	Fenomena <i>local Strongman</i> (Studi Kasus Pengaruh Sukarmis Dalam Mendukung Kemenangan Andi Putra Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi)	Fenomena <i>local strongman</i> di Kabupaten Kuantan Singingi, yang berlatar belakang seorang mantan Bupati Kuantan Singingi yaitu Sukarmis dan merupakan seorang senior di dalam perpolitikan yang mengupayakan anaknya yakni	Terdapat peran serta fenomena <i>local strongman</i> dalam pemilihan anggota legislatif di tingkat lokal. Peran <i>local strongman</i> ini bisa membawa dampak yang positif bagi calon karena dengan	Sosok <i>local strongman</i> dalam mendukung kemenangan Andi Putra sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi merupakan mantan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

	<p>Andi Putra          untuk mengikuti          jejaknya terjun          dalam politik          dan menjadi          Dewan          Perwakilan          Rakyat Daerah          Kuantan          Singingi.          Selama          jabatannya          memimpin          Kabupaten          Kuantan kinerja          politik Sukarmis          sudah tidak          diragukan lagi.          Kemenangan          Andi meraih          kursi DPRD          Kuantan          Singingi tidak</p>	<p>perannya          tersebut          membawa          pada          kemenangan          dan bisa          menduduki          kursi          legislatif          lokal.</p>	
--	---	--	--

		lepas dari dukungan Sukarmis.		
2	Peran <i>local strongman</i> pada kontestasi politik (Studi Terhadap Kemenangan Agus Sudrajat Pada Pilkades Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya)	Fenomena politik yang terjadi di Desa Sinagar Kabupaten Tasikmalaya, dengan kehadiran sosok <i>local strongman</i> . Sosok orang kuat lokal dalam pilkades ini memiliki peranan yang cukup besar, ia berperan mendukung salah satu calon yakni Agus Sudrajat. Akan	<i>Local strongman</i> yang berperan dalam kemengan Agus Sudrajat sama sama seorang pegusaha	Pada kemengan Agus Sudrajat ini sama hal nya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adanya peran <i>local strongman</i> . Akan tetapi pada kemengan Agus Sudrajat ini terdapat beberapa kecurangan salah satunya penggelembungan jumlah suara

		tetapi pada kemenangan Agus Sudrajat diduga banyak terdapat kecurangan.		
3	Sinergi <i>Local Strongmen:</i> Pengusahan Dan Tokoh Agama Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Demak	Dengan banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk mendekati dan menarik perhatian masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif yaitu dengan kekuatan elit lokal. Elit lokal yang terlibat dalam pemilihan legislatif 2019 di	Terdapat peran <i>local strongman</i> yaitu merupakan seorang pengusaha yang terlibat dalam pemilihan legislatif lokal yang mana hal ini sama dengan penelitian yang akan diteliti	Pada Pemilihan legislatif 2014 di Demak didukung oleh elit politik yaitu seorang Tokoh Agama dan pengusaha. Yang mana salah satu elit lokal yang terlibat dalam pemilihan legislatif lokal di demak ini yaitu Tokoh Agama tidak ada di dalam penelitian yang akan diteliti.

		<p>Demak yaitu kiai dan pengusaha. Elit lokal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam agen sosial, seperti halnya kiai pada acara keagamaan pasti akan bisa memobilisasi masyarakat dengan caranya, karena dengan kepercayaan masyarakat kepada kiai akan mendapatkan dampak positif kepada calon yang didukung</p>		
--	--	--	--	--

		oleh kiai tersebut.		
--	--	------------------------	--	--